

# **DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KINERJA EKONOMI NASIONAL DAN KEMISKINAN**

**Ismanto Hadi Santoso**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV no 54 Surabaya  
*e-mail: ismantohadis@yahoo.com*

## ***Abstract***

*The purpose of this research was to analyze Indonesian economic performance after global economic crisis in 2008. Beside that, the purpose of this research was to analyze the relationship between global economic crisis and poverty. Basic concept of this research used Kuznets's Theory (1971). This theory explain that at the beginning of development process, rate of poverty tend to rise and at the ending of development process, rate of poverty tend to decline. This research used descriptive-quantitative analysis and based on data of Badan Pusat Statistik (BPS). Gini Ratio was used as indicator of size discrepancy of community's income. The result of this research indicated that after economic crisis in 1997, Indonesian economic had negative growth 13,24%. Beside that, the size of poverty community had slight increase from 21,5 billion persons in 1996, become 29,4 billion persons in 1998. After economic crisis in 2008, economic growth had decline, even at 2010 economic growth had good condition with growth as 7,1%. Unfortunately, good condition of economic growth did not followed by dissemination of national income. It was proved by Ratio Gini from 0,345 in 2006, become 0,39 in 2010. This indicated that discrepancy of economic tend to rise.*

***Key words:*** *economic growth, distribution of revenue, economic crisis*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hakekat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat. Hal itu berarti menekankan perlunya pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada artinya keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi perekonomian yang terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan

yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi tetap dapat terjaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pendapatan perkapita beberapa kali lipat, menurunnya secara drastis jumlah penduduk miskin dan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi rakyat.

Krisis finansial global 2008 diawali kebangkrutan Lehman Brothers, sebuah firma jasa keuangan, yang merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat (setelah Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Merrill Lynch). Firma jasa keuangan tersebut bergerak di bidang bank investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi (khususnya sekuritas keuangan AS, yang selanjutnya menyeret dunia ke dalam krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut cukup mengejutkan karena bersumber dari negara superpower (Amerika Serikat), sebagai negara yang menjadi kiblat perekonomian negara-negara di dunia, utamanya negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme.

Dampak negatif yang paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis perekonomian global adalah pada sektor keuangan melalui aspek sentimen psikologis dan akibat merosotnya likuiditas global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia. Bagi negara-negara berkembang dan *emerging markets*, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Kekhawatiran atas dampak negatif pelemahan ekonomi global terhadap perekonomian di negara-negara *emerging markets* dan *fenomena flight to quality* dari investor global di tengah krisis keuangan dunia dewasa ini, telah memberikan tekanan pada mata uang seluruh dunia, termasuk Indonesia dan meringkankan likuiditas dolar Amerika Serikat di pasar domestik di banyak negara. Hal ini menyebabkan pasar valas di negara maju dan berkembang cenderung bergejolak di tengah ketidakpastian yang meningkat.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara adidaya tersebut merupakan salah satu negara yang terimbas dari krisis finansial global tersebut, sehingga sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satu dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008, atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%. Selain menurunnya kinerja neraca pembayaran, juga berdampak terhadap tekanan nilai tukar Rupiah. Krisis finansial global memberi efek depresiasi terhadap mata uang. Kurs Rupiah

melemah menjadi Rp 11.711,- per USD pada bulan November 2008 yang merupakan depresiasi yang cukup tajam, karena pada bulan sebelumnya Rupiah berada di posisi Rp 10.048,- per USD. Melemahnya mata uang Rupiah dan kenaikan inflasi serta kesulitan likuiditas atau modal kerja dari perbankan yang menegatkan kebijakan pemberian kreditnya, membuat melemahnya daya beli masyarakat.

Dampak yang tidak menguntungkan juga terjadi di sisi impor, karena dengan melemahnya Rupiah, maka nilai impor akan melonjak yang selanjutnya akan menyulitkan para importir untuk menyelesaikan transaksi impor. Dampak berikutnya adalah melonjaknya harga-harga bahan yang berasal dari impor di pasar sehingga inflasi meningkat dan daya beli masyarakat juga akan menurun. Hal ini selanjutnya mengakibatkan turunnya daya serap masyarakat terhadap barang-barang impor, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan jumlah impor. Menurunnya order dari rekanan di luar negeri membuat banyak perusahaan kesulitan memasarkan produknya yang pada akhirnya harus melakukan efisiensi atau rasionalisasi supaya dapat bertahan hidup.

Penurunan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar 50,0%, dan depresiasi nilai tukar rupiah disertai dengan volatilitas yang meningkat. Sepanjang tahun 2008, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sebesar 17,5%. Kecenderungan volatilitas nilai tukar rupiah tersebut masih akan berlanjut hingga tahun 2009 dengan masih berlangsungnya upaya penurunan utang (*deleveraging*) dari lembaga keuangan global.

Selain dampak negatif, ternyata krisis juga memberi dampak positif bagi Indonesia, terutama terhadap kenaikan investasi. Penguatan arus dan masuk ke pasar modal ikut mengerek nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 9.000 atau menguat 21,5% dari posisi tertinggi pada November 2008 yang mencapai Rp12.650 per dolar AS. Selain itu, pergerakan rupiah untuk pertama kalinya sejak perdagangan Oktober 2008 terapresiasi melampaui Rp10.000 setelah IHSG menguat 8 hari berturut-turut ke level 2.078,93, atau mencetak rekor kenaikan simultan terpanjang sejak periode *bullish* 2007.

Mengacu pada konsep dalam mengukur kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengukur kemiskinan menggunakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni *effect trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Krisis ekonomi yang terus berkepanjangan dan terjadinya krisis global tahun 2008 juga akan berdampak terhadap jumlah orang miskin di Indonesia. Bila hal tersebut benar-benar terjadi, bangsa akan semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain yang juga dilanda krisis tetapi segera dapat mengatasinya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana kinerja ekonomi Indonesia ditinjau dari pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008? (2) bagaimana dampak krisis ekonomi global tahun 2008 pada kemiskinan yang terlihat dalam pemerataan distribusi pendapatan nasional?

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang dampak krisis ekonomi global tahun 2008 pada pemerintah Indonesia terutama pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi dampak krisis tersebut, terutama masalah kemiskinan yang timbul dari kesenjangan distribusi pendapatan nasional.

## TELAAH PUSTAKA

### **Teori Pembangunan**

Membangun masyarakat yang adil dan makmur adalah suatu cita-cita yang luhur, tetapi juga suatu tantangan yang berat. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan sumber alam yang memadai, tetapi itu saja belum cukup. Untuk membangun bangsa dan negara yang sebesar ini perlu tindakan yang terarah dan terencana.

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Menurut Easton dalam Budiardjo (1985) proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.

Emil Salim (sebelumnya, sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978) juga telah memberikan rumusan pengertian pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumberdaya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia

Didalam buku “Arief Budiman”, teori pembangunan lahir dari negara-negara Dunia Ketiga (negara miskin atau negara yang sedang berkembang). Teori pembangunan (dunia ketiga) yang dipakai dalam konsep ini adalah “Teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi dan ilmu pengetahuan.

### **Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi jangka panjang mengubah struktur ekonomi dari pertanian menuju industri (sektor non primer) terutama industri manufaktur dengan increasing return to scale. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pendapatan perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi.

Dalam hal pemikiran tentang pembangunan ekonomi, telah terjadi suatu perkembangan yang patut diperhatikan. Sejak Adam Smith menulis bukunya yang terkenal: *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) para ahli ekonomi tidak banyak mempersoalkan masalah pembangunan ekonomi. Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi dianggap sudah semestinya terjadi. Masalah

pembangunan ekonomi baru muncul lagi sesudah Perang Dunia II, ketika banyak negara bekas jajahan mencapai kemerdekaannya dan bertekad untuk segera mengejar keterbelakangannya dan mengatasi masalah kemiskinan, ketergantungan dan ketertinggalannya.

Prasyarat-prasyarat yang perlu diusahakan atau dilengkapi sebelum suatu negara dapat “lepas landas”, antara lain:

a. Perubahan ekonomi

Kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan, dengan modernisasi dan penerapan teknologi maju, kenaikan daya beli masyarakat, sehingga mampu membeli hasil-hasil industri (pasar), perluasan prasarana produksi dan sosial di luar sektor industri, seperti perhubungan, perbankan, pendidikan dan kesehatan

b. Perubahan sikap mental masyarakat

Sikap yang dibutuhkan untuk pembangunan, antara lain: berorientasi pada masa depan; kemampuan untuk bekerja sama secara disiplin dan bertanggung jawab; bersikap rasional: efisiensi, menghargai waktu dan kekayaan immateriil.

c. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kepemimpinan nasional yang berorientasi pada pembangunan.

e. Munculnya usahawan-usahawan sejati, bukan yang karbitan.

f. Keseimbangan Neraca Pembayaran perlu dijaga untuk memperkecil ketergantungan dari modal luar negeri.

### **Pergeseran Struktur Ekonomi**

Dalam model Lewis perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor tradisional di pedesaan dan sektor industri modern perkotaan yang lebih produktif dan dapat sedikit demi sedikit menampung kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian. Perhatian utama model ini adalah pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dari desa ke kota serta pertumbuhan produksi dan kesempatan kerja di sektor modern. Perkembangan sektor modern ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri, sedangkan tingkat upah di perkotaan cukup lebih tinggi untuk menarik tenaga kerja dari desa ke kota, tetapi tidak naik dengan terlalu cepat. Yang disyaratkan agar proses ini berjalan dengan baik adalah bahwa keuntungan yang diperoleh di sektor modern ditanam kembali dalam sektor modern (dan tidak dilarikan ke bank di luar negeri) dan digunakan untuk perluasan usaha (bukan untuk membeli barang modal yang lebih canggih yang justru menghemat tenaga kerja). Juga diandaikan bahwa tenaga kerja yang tidak terampil

yang mengalir dari desa ke kota semuanya bisa ditampung di sektor modern. Jelaslah kiranya bahwa syarat-syarat dan anggapan-anggapan ini kenyataannya sulit terpenuhi.

Pola perubahan yang terjadi, bila pendapatan per kapita suatu negara berkembang mulai naik, antara lain:

- a. Transformasi struktur produksi: terjadi pergeseran dari produksi barang pertanian ke produksi barang industri: peranan industri (sebagai % *gross national product*/GNP) meningkat dan peranan pertanian menurun.
- b. Tingkat tabungan dan akumulasi modal, baik modal fisik maupun modal manusia (pendidikan) semakin meningkat.
- c. Terjadi perubahan dalam komposisi permintaan dalam negeri: pengeluaran masyarakat untuk pangan relatif menurun, pengeluaran untuk konsumsi bukan pangan naik, pengeluaran untuk investasi dan untuk sektor pemerintah meningkat. Biasanya baik impor maupun ekspor naik dan komposisi ekspor berubah dari bahan-bahan mentah menjadi lebih banyak barang industri.
- d. Penggunaan faktor produksi terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, sedangkan produktivitas di sektor pertanian juga meningkat.
- e. Perubahan sosial: terjadinya urbanisasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian menurun, sekaligus distribusi pendapatan makin timpang (perbedaan kaya-miskin semakin mencolok).

Dalam model ini, selain peranan tabungan dan investasi, ditunjuk pula adanya setumpuk faktor lain yang (harus) ikut berubah agar perekonomian dapat berkembang dari sistem ekonomi tradisional menjadi sistem modern, termasuk kendala-kendala dari dalam negeri seperti keterbatasan sumber daya, jumlah dan pertumbuhan penduduk, rintangan kelembagaan, kebijakan dan cara kerja pemerintah. Juga kendala yang berasal dari dunia internasional seperti kesulitan (atau kemudahan) mendapatkan modal dari luar negeri, peralihan teknologi yang canggih tapi padat modal, padahal yang dibutuhkan teknologi madya yang padat karya dan sebagainya.

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Hipotesis Kuznets menyatakan: “Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang”. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap

tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

## METODA PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

### Definisi Operasional

#### *Gross Domestic Product (GDP)*

BPS membagi ekonomi nasional dalam 9 sektor:

(1) Pertanian (2) Pertambangan dan penggalian (3) Industri manufaktur (4) Listrik, gas, dan air bersih (5) Bangunan (6) Perdagangan, hotel dan restoran (7) Pengangkutan dan komunikasi (8) Keuangan, sewa dan jasa perusahaan (9) Jasa-jasa

Keterangan:

$$PDB = \sum_{i=1,2,\dots,9} NO_i$$

### *Distribusi Pendapatan*

*Gini ratio* mengukur sejauh mana distribusi pendapatan (atau, dalam beberapa kasus, pengeluaran konsumsi) di antara individu atau rumah tangga dalam perekonomian menyimpang dari distribusi yang sangat seimbang. Sebuah plot kurva Lorenz prosentase kumulatif total pendapatan yang diterima terhadap jumlah kumulatif penerima, dimulai dengan individu atau rumah tangga termiskin. Secara konsep, gini ratio mengukur daerah antara kurva Lorenz dan garis hipotetis kesetaraan mutlak, dinyatakan sebagai prosentase dari luas maksimum di bawah garis. Dengan demikian indeks Gini dari 0 merupakan kesetaraan yang sempurna, sementara indeks 100 berarti kesetaraan yang tidak sempurna, semakin tinggi

angka Gini ratio, maka tingkat kesenjangan antara penduduk miskin dengan kalangan menengah dan menengah atas semakin besar. Tingginya gini ratio menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak berkualitas karena hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Pertumbuhan yang ada dinilai tidak merata, karena belum mampu menyentuh masyarakat miskin. Gini ratio merupakan alat ukur yang umum digunakan dalam studi empiris, yaitu dengan formula:

$$\text{Gini} = \frac{1}{2n^2 - y} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |y_i - y_j|$$

*Sumber: Statistik Indonesia (BPS)*

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

### **Teknik Analisis**

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif - kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek dan subyek yang diteliti secara tepat dan sistematis, mengingat metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian memungkinkan untuk dilakukan hubungan antar variabel, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Dalam penelitian kuantitatif, data berupa bilangan, yakni menunjuk intensitas dan atau ekstensitas dari gejala yang diperoleh dari hasil observasi.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja Ekonomi Setelah Krisis 2008**

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat dari krisis ekonomi 1997 menjadi pelajaran bagi pemerintah selanjutnya, sehingga krisis global tahun 2008 tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian Nasional. Ekonomi Indonesia tidak mengalami penurunan yang cukup berarti seperti saat periode krisis ekonomi 1997,

tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,01%, atau hanya turun sebesar 0,33% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007. Kemampuan mengatasi krisis global tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia dibanding negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang yang jatuh akibat krisis global. Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan positif sebesar 4,5% pada tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Dampak adanya krisis global ini justru baru dirasakan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,44%. Tahun 2010 kondisi perekonomian Indonesia kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar 6,1%, meningkat dibandingkan tahun 2009 dan mampu lebih tinggi dari tahun 2008.

Keberhasilan pemerintah dalam menghadapi krisis global, membuat kekuatan ekonomi Indonesia pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India dan China). Kemampuan untuk meredam akibat dari keuangan ini dapat terjadi berkat kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan tepat, di samping kondisi keterbukaan yang tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia. Keberhasilan mengatasi krisis global antara lain dikarenakan, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia telah menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu: (1). BI rate, (2). Nilai tukar, (3). Operasi moneter, dan (4). Kebijakan makro prudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makro prudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.

### **Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Kemampuan Indonesia bertahan terhadap krisis keuangan tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sayangnya keberhasilan dalam bidang ekonomi pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-

migas. Sub-sektor industri non migas ini menjadi prioritas utama. Hal ini selain untuk penghematan sumber daya alam yang tidak mudah untuk diperbarui, juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat agar penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) berkurang. Berbagai fasilitas diberikan kepada calon investor asing, termasuk hak untuk membayar upah buruh rendah, sebagai keunggulan komparatif.

Upah buruh murah ini memang telah menjadi *trade mark* Indonesia dalam promosi penarikan modal asing. Asumsi yang dipakai, bahwa dengan upah buruh yang murah, maka harga pokok barang-barang yang diproduksi akan murah. Dengan demikian, produk ekspor Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi. Padahal, meskipun harga pokok mempunyai korelasi dengan daya saing, karena barang dapat dijual dengan harga murah, tetapi daya saing suatu barang tidak sekadar ditentukan oleh harga (pokok), tetapi juga oleh kualitas barang, teknik pemasaran, politik/diplomasi dan lain-lain.

Di sisi lain, upah buruh yang murah menyebabkan rendahnya daya beli buruh, oleh karenanya agar buruh dapat hidup, maka harga bahan makanan khususnya harga bahan pokok harus dapat dipertahankan rendah. Inilah yang menjadi tugas pokok Bulog (Badan Usaha Logistik) sejak waktu dibentuk oleh pemerintah. Jika harga bahan makanan dalam negeri naik, Bulog segera harus mengimpor dari luar negeri agar harga dapat dikendalikan pada tingkat yang rendah (murah). Rendahnya harga bahan makanan yang note bene hasil produksi petani, mengakibatkan proses pemiskinan petani di daerah pedesaan secara berkelanjutan.

Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah sangat lebar, akan terdapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pembangunan. Artinya, setiap melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, sulit dirasakan, pada saat yang sama boleh jadi sedang berlangsung proses pemiskinan. Keadaan ini dapat ditunjukkan dengan angka-angka sederhana sebagai berikut:

Jika misalnya, suatu negara berpenduduk 100 juta orang, terdapat 5% penduduk dengan pendapatan rata-rata US\$ 300.000 per tahun, sementara 95% lainnya berpendapatan US \$ 3000 per tahun (setingkat pendapatan rata-rata Indonesia sekarang). Andaikan, jika golongan penduduk kaya yang 5% itu naik pendapatannya 10% per tahun, sementara golongan menengah ke bawah yang 95% itu mengalami penurunan pendapatan per tahun sebesar 20%, akan terjadi kenaikan

pendapatan rata-rata sebesar 5,21%. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perhitungan sederhana seperti berikut:

1. Total pendapatan semula adalah:
  - a. 5 Juta X US\$ 300.000 = US\$ 1.500.000
  - b. 95 Juta X US\$ 3.000 = US\$ 285.000Total pendapatan US\$ 1.785.000
2. Kalau kemudian terjadi kenaikan pendapatan 10% dari golongan kaya (5%), dan pendapatan golongan miskin turun 20%, maka akan terlihat:
  - a. Total pendapatan penduduk kaya yang 5% menjadi = US\$ 1.500.000 + US\$ 150.000 = US\$ 1.650.000
  - b. Total pendapatan penduduk menengah dan miskin yang 95% adalah = US\$ 285.000 - US\$ 57.000 = US\$ 228.000.
3. Total pendapatan nasional baru adalah = US\$ 1.650.000 + US\$ 228.000 = US\$ 1.878.000. Ini berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar = US\$ 1878.000 – US\$ 1.785.000 = US\$ 93.000 atau sama dengan  $(93.000 / 1.785.00) \times 100\% = 5,21\%$ .

Dengan demikian dapat dipahami, sekalipun mengalami kenaikan pendapatan per kapita setiap tahun sekitar 5 - 6%, namun kemiskinan dalam masyarakat makin bertambah. Inilah barangkali yang dapat disebutkan sebagai *growth with poverty* atau bisa disingkat sebagai “*groverty*”, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai pertumbuhan dengan kemiskinan atau disingkat sebagai pertumkin. Meskipun contoh tersebut memang dikemukakan secara agak mencolok, tetapi bagaimanapun, inilah yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Singkatnya, yang menjadi masalah adalah melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam masyarakat, yang tidak sepenuhnya dapat ditunjukkan hanya dengan menggunakan indeks gini ratio. Untuk mengatasinya, diperlukan adanya pengamatan yang lebih seksama di lapangan dan kebijakan yang bersifat afirmatif memihak kepada golongan miskin, terutama kepada mereka yang ada di pedesaan.

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Perhitungan elastisitas kemiskinan yang umum digunakan di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang untuk mendapatkan variasi-variasi di dalam sensitivitas dari penurunan kemiskinan terhadap pertumbuhan. Elastisitas ini biasanya diinterpretasikan sebagai prosentase perubahan kemiskinan untuk suatu kenaikan 1% dalam laju pertumbuhan ekonomi. Dalam teori, elastisitas-elastisitas kemiskinan memberi kesan suatu pola pertumbuhan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan karena kesenjangan yang berkurang dalam distribusi pendapatan dan tingkat yang rendah dari kesenjangan awal.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita semakin rendah tingkat kemiskinan. Elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1%, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1% membuat 1% peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin. Sedangkan bila hasil estimasi elastisitas tersebut hanya sekitar 0,8%, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia laju pertumbuhan PDB/kapita rata-rata per tahun yaitu 0,81%, sedangkan perubahan kemiskinan rata-rata per tahun 0,67%. Rendahnya laju pertumbuhan PDB/kapita dikarenakan masih tingginya pertumbuhan penduduk, terutama masyarakat pedesaan. Menurut hasil sensus tahun 2010, penduduk Indonesia mencapai 237,641,326 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk seperti pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Pulau**

Provinsi	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	1980-1990	1990-2000
Sumatra	3,04	2,02
Jawa	2,17	1,96
Nusa Tenggara dan Bali	1,71	1,59
Kalimantan	3,32	2,39
Sulawesi	9,55	8,54
Maluku	2,59	1,11
Papua	3,46	3,22
<b>INDONESIA</b>	1,98	1,49

*Sumber: Diolah dari hasil Sensus Penduduk (BPS)*

Studi-studi empiris lainnya yang juga membuktikan adanya suatu relasi negatif (*trade-off*) yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah dari Deininger dan Squire (1996). Studi mereka ini yang juga memakai data lintas Negara sangat menarik karena tidak menemukan suatu keterkaitan yang sistematis, walaupun relasi antara pertumbuhan PDB dan pengurangan kemiskinan positif. Penelitian lainnya, misalnya hasil penelitian dari Ravallion dan Chen (1997) yang menggunakan data dari survei-survei pendapatan/pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) di 67 NSB dan negara-negara transisi untuk periode 1981-1994 juga menunjukkan bahwa, penurunan kemiskinan hampir selalu berbarengan dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita atau standar kehidupan dan sebaliknya kemiskinan bertambah dengan kontraksi ekonomi. Hasil plot antara perubahan laju kemiskinan (dalam log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antar survei menunjukkan suatu tren yang negatif. Sedangkan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan metode yang sama (analisis lintas negara) menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah, jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB, semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Juga, studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.

Dalam perdebatan akademis selama ini mengenai hubungan antara pertumbuhan dan penurunan kemiskinan, pertanyaan pokoknya adalah: apakah pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin? Dalam akhir 1990-an, istilah “pertumbuhan yang pro kemiskinan” (sebut PPG) ini menjadi terkenal saat banyak ekonom mulai menganalisis paket-paket kebijakan yang dapat mencapai penurunan kemiskinan yang lebih cepat lewat pertumbuhan ekonomi dan perubahan distribusi pendapatan. PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan. Dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, di dalam literatur muncul dua pendekatan. Pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan atau dalam perkataan lain, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini disebut juga definisi relatif dari PPG. Walaupun secara intuisi menarik, pendekatan atau definisi ini terbatas, terutama saat diterapkan di dalam suatu

konteks operasional. Dalam definisi PPG ini, pertumbuhan bisa mengurangi kesenjangan. Namun, dengan memfokuskan terlalu berat pada kesenjangan, suatu paket kebijakan bisa mengakibatkan hasil-hasil yang suboptimal bagi kedua kelompok rumah tangga (RT): RT miskin dan RT nonmiskin; atau laju penurunan kemiskinan bisa lebih kecil (World Bank, 2005).

Pendekatan kedua, fokus pada percepatan laju pertumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan-kesempatan bagi orang-orang miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju penurunan kemiskinan. Bukti empiris memberi kesan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penggerak utama laju PPG, tetapi perubahan-perubahan dalam kesenjangan bisa memperbesar atau mengurangi laju tersebut. Jadi, mempercepat laju PPG mengharuskan tidak hanya pertumbuhan yang lebih pesat, tetapi juga upaya-upaya untuk memperbesar kemampuan-kemampuan dari orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.

### **Perkembangan Kemiskinan**

Dalam membahas kemiskinan dalam penelitian ini, metode penetapan untuk mengukur kemiskinan dan data yang digunakan sepenuhnya mengacu pada metode dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

- a. BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- b. Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.).

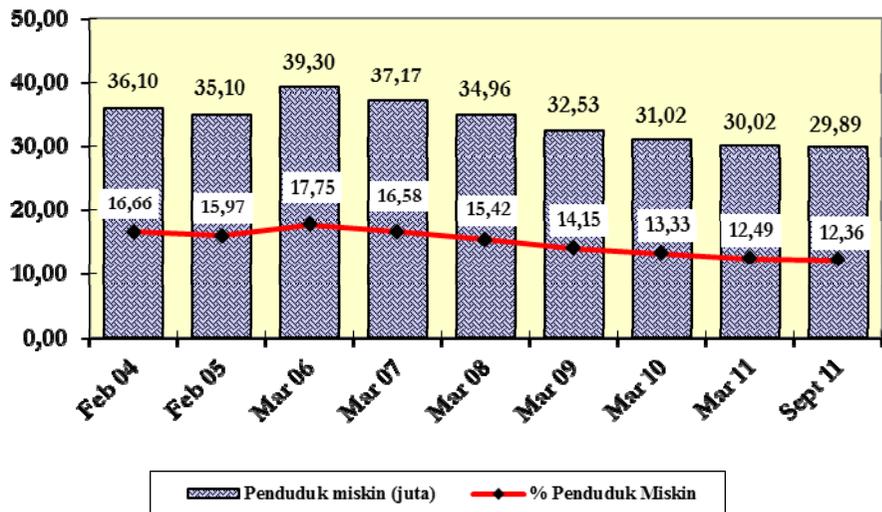
- d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di perdesaan.
- e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Selama masa yang panjang, sejak beberapa dekade yang lalu, di Indonesia berlangsung proses pemiskinan desa secara berkelanjutan. Jumlah penduduk miskin tahun 1996 menurut data BPS adalah 21,5 juta jiwa pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997, mengakibatkan jumlah orang miskin naik drastis menjadi 79,4 juta jiwa, terdiri dari 21,6 juta jiwa penduduk kota dan 56,8 juta jiwa penduduk desa.

### **Perkembangan Kemiskinan Tahun 2004 - 2011**

Jumlah dan prosentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 ke 2005. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin naik karena harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai 2011 jumlah maupun prosentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan. Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai tahun 2011, ditunjukkan oleh gambar 1.

Penurunan penduduk miskin, baik secara jumlah maupun dalam prosentase menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan selama periode tahun 2004 sampai dengan 2001. Namun demikian, mengingat jumlah penduduk miskin secara nasional masih relatif tinggi, maka upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Terlebih lagi bila dilihat dari sebaran penduduk miskin antara kota dan desa. Jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibanding dengan penduduk miskin di kota. Perbandingan antara penduduk miskin di desa dengan di kota dapat dilihat pada tabel 2.



Sumber: BPS Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

**Gambar 1**  
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004–2011

**Tabel 2**  
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2007-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Prosentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp)		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2007	13559.3	23609.0	37168.3	12.52	20.37	16.58	187 942	146837	166697
2008	12768.5	22194.8	34963.3	11.65	18.93	15.42	204 896	161831	182636
2009	11910.5	20619.4	32530.0	10.72	17.35	14.15	222 123	179835	200262
2010	11097.8	19925.6	31023.4	9.87	16.56	13.33	240301	191212	221452

Sumber data: BPS (2011)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa, prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, tetapi dilihat dari jumlah penduduk miskin penurunan yang ada masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, dimana selama periode tahun 2007

sampai dengan 2010 penduduk rata-rata naik 1,3%. Prosentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada tahun 2007 sebesar 12,52%, menurun sedikit menjadi 9,87% pada tahun 2010. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2007 sebesar 20,58%, menurun menjadi 16,56 persen pada tahun 2010.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada tahun 2007, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 83,53%, dan tahun 2010 menjadi 78,52%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan dan pendidikan.

Pada periode 2007-2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Besar jumlah penduduk miskin, terbanyak di perdesaan sangat memprihatinkan, mengingat perumtubuhan penduduk desa relatif lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk di kota, sehingga anak keluarga miskin terus bertambah, akibatnya mereka kurang gizi dan kurang pendidikan, sehingga akan lahir generasi yang kurang berpendidikan (bodoh) dan lemah karena kesehatan kurang mendukung.

### **Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Menurut Pulau 2011**

Tabel 3 menunjukkan prosentase penduduk miskin menurut pulau berdasarkan Susenas September 2011. Dari tabel tersebut tampak bahwa prosentase penduduk miskin terbesar di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 25,25 persen, sementara prosentase penduduk miskin terkecil di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,88 persen.

**Tabel 3**  
**Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, 2011**

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000)					
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sumatera	2.045,34	4.273,53	6.318,87	10,1	13,55	12,2
Jawa	7.527,73	9.216,68	16.744,41	9,28	16,08	12,09
Bali dan Nusa Tenggara	645,32	1.420,50	2.065,82	12,29	17,51	15,46
Kalimantan	266,03	705,86	971,88	4,45	8,65	6,88
Sulawesi	354,15	1.798,00	2.152,15	5,96	15,32	12,17
Maluku dan Papua	116,01	1.520,99	1.637,00	6,09	33,21	25,25
<b>Indonesia</b>	<b>10.954,58</b>	<b>18.935,56</b>	<b>29.890,14</b>	<b>9,09</b>	<b>15,59</b>	<b>12,36</b>

*Sumber: Diolah dari data Susenas September 2011.*

Dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Pulau Jawa (16,74 juta orang); sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang).

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang harus ditangani dengan melibatkan berbagai pihak. Kesadaran kaum miskin harus ditingkatkan guna mengatasi persoalan ekonomi yang mereka hadapi. "Itu perlu perhatian sungguh-sungguh pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat". Proyeksi pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional menuntut langkah-langkah tepat dan terarah. Sementara itu, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, menekan angka inflasi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, langkah utama yang patut ditempuh pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Untuk itu, dalam rangka membangkitkan optimisme bangsa agar bangkit dari krisis berkepanjangan, sektor usaha mikro dan kecil harus menjadi prioritas penanganan untuk digerakkan. Langkah lain yang tak kalah penting untuk ditempuh pemerintah adalah memperbaiki UU Ketenagakerjaan dan merehabilitasi infrastruktur. Untuk itu semua, perbaikan iklim investasi menjadi prasyarat mutlak.

Kemiskinan sebagai masalah nasional, tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi

kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi.

### **Distribusi Pendapatan**

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat mampu dengan masyarakat miskin. Banyak negara yang menggunakan Gini ratio sebagai alat untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat. Kesenjangan itu tercermin pada angka "gini ratio", dimana semakin besar "gini ratio" semakin besar kesenjangan yang ada.

Menurut data Bank Indonesia (BI), angka "gini ratio" Indonesia terus bertambah dari 0,288 pada 2002 menjadi 0,340 pada 2005 dan naik menjadi 0,345 pada 2006. Data tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat mampu dengan masyarakat yang miskin di Indonesia dari tahun ke tahun selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 semakin terpuruk. Tingginya angka gini ratio hampir terjadi di seluruh negara berkembang seperti India atau China.

Menurut laporan Bank Dunia, gini ratio di Indonesia tahun 2009 adalah 0,37, sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan gini ratio di Indonesia tahun 2010 adalah 0,39, sedikit lebih tinggi dibanding pengukuran Bank Dunia. Namun Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada tahun 2011 telah mengusulkan kepada pemerintah untuk menekan tingkat kesenjangan sosial, dengan mengupayakan angka gini ratio (tingkat kesenjangan) bisa di bawah 0,3.

Memang ironis bahwa, walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia orang miskin "baru" semakin bertambah.

Meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya, sementara, kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula dan hal ini akan membuat pembagian pendapatan semakin senjang.

Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

1. Distribusi pendapatan antar golongan pendapatan (*size distribution of income*) atau ketimpangan relatif

Jika dilihat dari data SUSENAS dengan menggunakan koefisien Gini, maka akan terlihat bahwa distribusi pendapatan di daerah perkotaan di Jawa lebih buruk daripada daerah di luar Jawa, begitu pula dengan daerah pedesaannya daerah Jawa memiliki tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah bila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa.

2. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*).

Menurut Gupta dari World Bank, pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Menurut Micahel Lipton, seorang ekonom Inggris, urban *bias* seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana alokasi sumber-sumber daya lebih banyak diprioritaskan di daerah perkotaan daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi. Kembali memperhatikan penjelasan teori ekonomi yang dualistik tentang terjadi kesenjangan pembagian pendapatan di negara-negara sedang berkembang, maka pertama-tama relevansinya terlihat dalam pola kesenjangan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oshima menjelaskan keadaan ini (kesenjangan di desa lebih tinggi dari pada di kota), sebagai hal yang unik. Dia meramalkan kesenjangan tersebut akan lebih lebar jika proses pembangunan pedesaan masih akan berlanjut.

3. Distribusi pendapatan antar daerah (*regional income disparities*).

Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan data-data statistik yang ada, terlihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat, namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi prosentase penduduk miskin, namun di lain pihak sebagian penduduk miskin menjadi semakin miskin. Dengan demikian, Indonesia belum termasuk kelompok negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang makin merata serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh

pemerintah. Pemerataan berarti suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya.

Untuk mewujudkan pemerataan ini, pemerintah Indonesia menerapkan “Delapan Jalur Pemerataan”, yaitu:

1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat.
2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan, khususnya melalui usaha-usaha padat karya.
4. Pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan pembangunan regional.
5. Pemerataan dalam pengembangan usaha, khususnya memberikan kesempatan yang luas bagi golongan ekonomi lemah untuk memperoleh akses perkreditan dan penggalakan koperasi.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran penduduk melalui transmigrasi dan pengembangan wilayah.
8. Pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.

Kenyataan bahwa Indonesia belum mampu melaksanakan pemerataan pembangunan mengharuskan pemerintah untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh agar Indonesia dalam tahun-tahun mendatang lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia. Jika dilihat keberhasilan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, dll. dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata, maka akan terlihat bahwa negara tersebut secara umum telah menerapkan tujuh model pembangunan yaitu:

1. Pembangunan yang mengutamakan penciptaan lapangan kerja, antara lain dengan mendorong penggunaan teknik-teknik produksi yang padat karya dalam pertumbuhan pertanian dan membantu kegiatan sektor informal.
2. Pembangunan yang mengutamakan penyaluran kembali investasi untuk membantu golongan penduduk miskin, antara lain melalui reorientasi investasi dari proyek-proyek besar ke proyek-proyek yang langsung membantu golongan miskin, seperti pendidikan, kesehatan, perkreditan, dll.
3. Pembangunan yang terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh penduduk, yaitu pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Pembangunan yang mengutamakan pengembangan sumber-sumber daya manusia yang harus didahului oleh redistribusi harta produktif, termasuk perluasan penyediaan kesempatan memperoleh pendidikan, sebelum dilakukan usaha pengembangan sumber-sumber daya manusia.
5. Pembangunan yang mengutamakan perkembangan pertanian dulu sebelum bisa mencapai pertumbuhan dengan pemerataan, khususnya dengan usaha *land reform*.
6. Pembangunan yang mengutamakan pembangunan pedesaan terpadu yang menekankan bahwa berbagai usaha pokok sangat di perlukan untuk keberhasilan pembangunan disertai pemerataan yaitu *land reform*, penggunaan teknik produksi yang padat karya oleh petani kecil, pembangunan prasarana oleh pekerja pertanian yang setengah menganggur, pengolahan jadi secara padat karya, usaha berdikari, pelaksanaan oleh suatu badan pemerintah yang melintasi yuridiksi kementerian lain dan perencanaan regional yang mencakup hubungan antara ibukota dan desa-desa.
7. Pembangunan yang mengutamakan penataan ekonomi internasional baru yang menekankan bahwa konteks atau lingkungan internasional harus diubah dulu sebelum strategi pembangunan disertai pemerataan dapat berhasil.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Pasca krisis tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan namun pada tahun 2010 kondisi ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang membaik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,1%. Kondisi yang membaik pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti pada pemerataan dalam distribusi pendapatan nasional yang menunjukkan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan naiknya prosentase Gini Ratio dari 0,345 pada tahun 2006 menjadi 0,39 pada tahun 2010.

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan berarti suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya. Untuk mewujudkan pemerataan ini, pemerintah Indonesia menerapkan “Delapan Jalur Pemerataan”, yaitu: pemerataan kebutuhan pokok rakyat, pendidikan, pembagian pendapatan melalui usaha-usaha padat karya, kesempatan kerja,

pengembangan usaha, kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, penyebaran penduduk melalui transmigrasi atau pengembangan wilayah dan pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.

### **Saran**

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuh, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Dampak adanya krisis global sempat dirasakan pada tahun 2009, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,58%, jika dibandingkan tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,44%, tetapi tahun 2010 kondisi perekonomian Indonesia kembali menunjukkan kondisi yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 tumbuh 6,1%.

Kinerja ekonomi 2008 pasca krisis global, memang membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia yang masih tumbuh positif, dibanding negara maju yang ekonominya tumbuh negatif, bahkan tahun 2010 tumbuh 6,1%, tetapi pemulihan ekonomi di negara maju umumnya relatif lebih cepat dibanding negara berkembang, oleh karenanya struktur ekonomi nasional harus diperkuat melalui penguatan sektor-sektor ekonomi, utamanya sektor industri yang menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

Dalam proses pembangunan ekonomi seharusnya bisa mengurangi jumlah penduduk miskin, demi kesejahteraan masyarakat umumnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, distribusi pendapatan, inflasi dan lainnya, karenanya selain pertumbuhan ekonomi, masalah laju pertumbuhan penduduk juga perlu mendapat perhatian pemerintah, dengan menciptakan penduduk tumbuh seimbang, sehingga terjadinya demografi yang ditandai dengan penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif.

Kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga tingginya tingkat tabungan masyarakat yang dapat diinvestasikan dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing. Tantangan lainnya berkaitan dengan penyebaran dan mobilitas penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di daerah yang telah padat penduduknya, terutama di pulau Jawa dan daerah perkotaan.

Kesejangan ekonomi antara penduduk perkotaan dengan pedesaan yang semakin melebar dari tahun ke tahun perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan. Oleh karenanya, perlu pengembangan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi desa yang dimiliki agar dapat tercipta lapangan kerja di daerah pedesaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 1998 sampai dengan 2011, *Statistik Indonesia*, BPS. Indonesia.
- ....., 2010, *Survey Sosial-Ekonomi Nasional*, BPS. Indonesia.
- ....., 2010, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, BPS. Indonesia.
- ....., 2010, *Data Statagis BPS*, BPS. Indonesia.
- Budiardjo, M. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Deininger, K. & Squire, L. 1996. A New data set measuring income inequality. *World Bank Economic Review*, World Bank Group, vol. 10 (3).
- Kuznets S, 1971, *Economic Growth of Nation: Total Output and Production Structure*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- Mills, E. S. & Pernia, E M. 1993. *The Economic Development of Southeast Asia*. Hal Hill, Baltimore: Johns Hopkins University Press
- Ravallion & Shaohua Chen. 1997. What can new survey data tell us about recent changes in distributuon and pomerty? *Word Bank Economic Review*. Washington, DC.
- Salim, E. 1978. Tantangan masa depan, pembangunan dengan pemerataan. *Prisma*, edisi 7, volume 8.
- World Bank, 2005, *Word Development Indicator, for Recontruction and Development*. Washington, DC.
- <http://bagkeu-bppk.net/content/mengatasi-dampak-krisis-global-melalui-program-stimulus-fiskal-apbn-09>
- <http://kupastuntasmanajemen.blogspot.com/2009/10/perekonomian-indonesia-di-era-reformasi.html>
- <http://metris-community.com/dampak-krisis-ekonomi-global/>
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/sejarah-ekonomi-indonesia-orde-lama-era-reformasi-2/>
- [http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/dampak\\_perekonomian.htm](http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/dampak_perekonomian.htm)
- [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_3/artikel\\_4.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_4.htm)

[http://www.janabadra.ac.id/id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=219dampakkrisis-keuangan-global-terhadap-perekonomian-indonesia&catid=61:fakultas-ekonomi](http://www.janabadra.ac.id/id/index.php?option=com_content&view=article&id=219dampakkrisis-keuangan-global-terhadap-perekonomian-indonesia&catid=61:fakultas-ekonomi)  
<http://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/08/13/sejarah-perekonomian-indonesia-sejak-orde-lama-hingga-reformasi/>